



PERATURAN BUPATI SRAGEN
No 19 Tahun 2024
tentang
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 2025



**20
25**

RENCANA KERJA

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2024**



**RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2025**

DISUSUN TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya, atas taufiq, hidayah dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2024 dapat dilaksanakan dan diselesaikan sebagaimana mestinya.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja 2025 disusun dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2024 serta Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Di dalam Renja 2025 ini memuat perencanaan program dan kegiatan yang akan menjadi acuan dokumen perencanaan pada Sekretariat DPRD pada Tahun 2025 dan diharapkan dengan disusunnya Renja 2025 ini menjadi kerangka dan acuan penting dalam pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD pada Tahun 2025 dalam mencapai tujuan Sekretariat DPRD Meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi DPRD serta Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja sehingga menunjang pelaksanaan visi Pemerintah Kabupaten Sragen "Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera Dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong".

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sragen, 17 Juli 2024

Sekretaris DPRD

Kabupaten Sragen


Drs. Tedi Rosanto, M.Si

NIP. 19680624 198803 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	33
BAB V PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 12

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD 17

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 21

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 25

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan perangkat daerah..... 28

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen Rencana Kerja Tahunan yang mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Renja merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi satuan kerja pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap pengelola pemerintahan diwajibkan menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Dalam pelaksanaan fungsinya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen. Peran serta lembaga Sekretariat DPRD memiliki arti penting karena memfasilitasi lembaga DPRD melalui alat kelengkapannya agar senantiasa dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara proporsional sebagai wujud dari pelaksanaan fungsi lembaga perwakilan rakyat Daerah yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah (Perda), Anggaran dan Pengawasan. Segala sesuatu terkait kebutuhan pelayanan tersebut telah terangkum dalam dokumen Renja Sekretariat DPRD.

Atas latar belakang itulah sehingga pada Tahun 2025 Sekretariat DPRD menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Renja Tahun Anggaran 2025 (Renja 2025) yang memuat program dan kegiatan pada Tahun 2025 untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 (RKPD 2025) dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen 2021-2026 (Renstra 2021-2026). Oleh karena itu secara substansial tujuan, sasaran dan program yang terkait dengan urusan perencanaan harus terakomodasi dan mewarnai seluruh substansi dokumen Renja Sekretariat DPRD.

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Konsep perencanaan menurut Dessler (2001) adalah proses menetapkan tujuan-tujuan dan rancangan tindakan, membangun peraturan-peraturan dan prosedur, dan memperhitungkan hasil-hasil yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Menurut Husein Umar (2009:65) "Rencana kerja adalah suatu proses yang tidak pernah berakhir, apabila rencana telah ditetapkan, maka dokumen mengenai perencanaan yang terkait harus diimplementasikan."

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah diminta menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja yang merupakan dasar dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan : Persiapan penyusunan renja meliputi : (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah; (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal
Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup : (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

3. Penyusunan Rancangan

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Sragen dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan, yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen Tahun 2025 menjabarkan rencana kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen, yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dari rancangan awal renja sampai rancangan akhir renja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu Renstra Sekretariat DPRD, rancangan awal RKPD, dan rancangan akhir RKPD. Pada penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan. Rancangan Awal Renja kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Renja. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Awal RKPD. Rancangan renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Sragen untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Rancangan Renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
11. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sragen Tahun 2025.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen tahun 2025 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen. Sedangkan tujuannya adalah:

1. Tersusunnya instrument rencana kerja yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen.
2. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan.

3. Tersusunnya program-program pembangunan dan rencana kerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai dengan bidang kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen.
4. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi anggaran dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja (Renja) PD Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang Memuat tentang Pengertian Renja, Proses Penyusun Renja, Keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra PD dan Renja Provinsi/Kab/ Kota.
- 1.2 Landasan Hukum Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja PD Kabupaten Sragen Tahun 2025.
- 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat Penjelasan tentang Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Renja PD Kabupaten Sragen.
- 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD Kabupaten Sragen, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (Tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2024).

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Menguraikan evaluasi pelaksanaan renja, baik itu realisasi keuangan dan capaian kinerja output.
 - 2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.
 - 2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.
 - 2.1.3 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan.

2.1.4 Implementasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra PD Kabupaten Sragen.

2.1.5 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD Menguraikan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen, struktur organisasi, data kekuatan pegawai dan indikator kinerja utama.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Kabupaten Sragen Memuat isu-isu penting pembangunan di Kabupaten Sragen yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi PD.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Menguraikan penjelasan perbandingan program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD Tahun 2021 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan.

Bab III Tujuan dan Sasaran

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menguraikan pokok-pokok Kebijakan prioritas program nasional yang terkait arah kebijakan daerah dengan Tupoksi PD Kabupaten Sragen.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja PD Memuat penjelasan tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran tahun 2024 dan perkiraan Tahun 2025 PD Kabupaten Sragen.

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menjelaskan penunjang yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab V Penutup

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja Bagian ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan Menguraikan kaidah-kaidah dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut Memuat penjelasan faktor-faktor tindak lanjut dalam pelaksanaan Renja PD Kabupaten Sragen.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah iktisar yang menjelaskan secara lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/ program/ kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang valid untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah program/ kegiatan. Sedangkan laporan keuangan tersebut diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam konsep ini diperlukan indikator input (masukan), output (keluaran) dan outcome (hasil). Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Indikator masukan (input) yaitu indikator yang menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia maupun berupa teknologi dan informasi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran;
2. Indikator keluaran (output) yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik maupun berupa non fisik;
3. Indikator hasil (outcome) yaitu indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Pada tahun 2023 ada 4 (empat) sub kegiatan yang tingkat realisasi target kinerjanya dibawah 100%. Pertama, sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan capaian anggaran sebesar 67,15% yang disebabkan karena realisasi kegiatan dalam langganan koran ada perubahan harga dan jumlahnya. Kedua, sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up dengan capaian anggaran sebesar 62,00% yang disebabkan karena keterbatasan waktu di akhir tahun serta padatnya jadwal anggota DPRD sehingga tidak semua anggota DPRD melakukan medical check up di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen. Ketiga, Fasilitas rapat dan koordinasi dan konsultasi DPRD capaian anggaran hanya sebesar 89,41% tidak terserapnya yaitu pada rekening sewa gedung yang disebabkan karena mayoritas kegiatan dewan dilakukan di kantor. Keempat, Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses capaian anggaran hanya sebesar 80,87% disebabkan adanya perbedaan harga sewa pada Standar Satuan Harga (SSH) di anggaran penetapan yang terlalu tinggi khususnya sewa genset dan sound sistem.

2. Realisasi sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Tahun 2023 ada 23 (dua puluh tiga) kegiatan yang mencapai realisasi target kinerja 100%.

3. Realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Tahun 2023 tidak ada yang mencapai realisasi target kinerja diatas 100%.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
Berdasarkan evaluasi, secara umum faktor-faktor atau permasalahan yang dihadapi adalah:
 - a. Kegiatan dilaksanakan menyesuaikan jadwal (Bamus).
 - b. Pengadaan barang karena negosiasi harga atau penyesuaian harga *e-catalog*.
 - c. Kegiatan yang anggarannya di perubahan anggaran sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran karena terbatasnya waktu.
 - d. Adanya perbedaan harga di DPA dengan realisasi anggaran.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
Implikasi yang timbul akibat tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan terhadap target capaian program Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Apabila pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang diturunkan menjadi lebih rendah atau sebanding dengan tahun sebelumnya..
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
 - a. Dalam perencanaan besaran anggaran tahun berikutnya harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga penyerapan anggaran dapat tercapai
 - b. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
 - c. Pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD dan fasilitasi yang dilaksanakan sangat tergantung dengan agenda Pimpinan dan Anggota Dewan serta Alat Kelengkapan.
 - d. Kurangnya sosialisasi ke Masyarakat terkait pelaksanaan fungsi DPRD, begitupula metode penyampaian aspirasi.
 - e. Dinamika kegiatan Dewan yang sangat cepat dan padat sehingga seringkali terjadi perubahan agenda kegiatan Dewan sewaktu-waktu.
 - f. Dinamika politik yang berkembang di DPRD sulit diprediksi secara pasti.

Adapun kebijakan/tindakan perencanaan yang dilakukan Sekretariat DPRD adalah:

- a. Dalam perencanaan besaran anggaran tahun berikutnya harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga penyerapan anggaran dapat tercapai
- b. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan pencapaian Renstra sampai tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Urusan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
Bidang Urusan SEKRETARIAT DPRD									
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Terfasilitasi [%]	100%	92%	100%	100%	100%	100%	292%	2,92%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan [%]	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3,00%
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 orang/bulan	86 orang/bulan	86 orang/bulan	86 orang/bulan	100%	86 orang/bulan	258 orang/bulan	3,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan [%]	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3,00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 orang	36 orang	36 orang	36 orang	100%	36orang	108 orang	3,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah [%]	100%	95%	100%	95%	102%	100%	290%	2,97%
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	36 laporan	3,00%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	3 paket	6 laporan	3,00%
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	36 paket	3,00%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket	9 paket	3,00%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	36 dokumen	3,00%
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	130%	5 laporan	15 laporan	3,30%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Cakupan pengadaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah [%]	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3,00%
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	1 laporan	1 laporan	2 laporan	100%	3 unit	3 laporan	3,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah [%]	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3,00%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	3,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	3,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	3,00%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								
<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah [%]</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3,00%
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	38 unit	38 unit	38 unit	38 unit	100%	36 unit	114 unit	3,00%
Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	15 unit	3,00%
<i>Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>	<i>Persentase terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD [%]</i>	100%	90%	100%	100%	100%	100%	290%	2,90%
Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	12 laporan	3,00%
Pelaksanaan medical check up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100%	50 orang	150 orang	3,00%
<i>Kegiatan Layanan Administrasi DPRD</i>	<i>Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD [%]</i>	100%	90%	100%	95%	90%	100%	290%	2,90%
Fasilitas rapat dan koordinasi dan konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	110 laporan	110 laporan	110 laporan	115 laporan	105%	110 laporan	335 laporan	3,05%
Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	36 paket	3,00%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Program PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD tepat waktu [%]	100%	90%	100%	100%	100%	100%	290%	2,90%
Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	<i>Prosentase tercapainya pembentukan perda dan peraturan DPRD [%] Jumlah pembahasan rancangan perda dan peraturan DPRD</i>	100%	90%	100%	100%	100%	100%	290%	2,90%
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah pembahasan rancangan perda dan peraturan DPRD	4 perda	100%	4 perda	4 perda	100%	4 perda	12 perda	3,00%
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	3,00%
Fasilitasi Penyusunan penjelasan/Keterangan dan/atau naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	12 dokumen	3,00%
Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	<i>Persentase tercapainya kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD [%]</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3,00%
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD [laporan]	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100%	6 laporan	18 laporan	3,00%
Publikasi dan dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen media penyebaran informasi [dokumen]	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	12 dokumen	3,00%
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	17 orang	17 orang	17 orang	17 orang	100%	17 orang	54 orang	3,00%
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	100%	6 orang	18 orang	3,00%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat [%]	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3,00%
Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	3 kegiatan	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	9 kegiatan	3,00%
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD [%]	100%	80%	100%	110%	131%	100%	310%	3,10%
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	150 dokumen	162 laporan	162 laporan	180 laporan	115%	162 laporan	504 laporan	3,36%
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	3,00%

KETERANGAN :
n : Tahun perencanaan (2025)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja Sekretariat Daerah dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen 2021-2026. Analisa kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis Tahun 2023
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai target sehingga dapat dijadikan patokan untuk tahun berikutnya
2	Tingkat kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD			83%	85%	88%	90%	-	85%	87%	89%	Lebih dapat ditingkatkan lagi dalam proses melayani kebutuhan pimpinan dan anggota DPRD

Kajian terhadap capaian kinerja Sekretariat Daerah dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen 2021-2026. Jika dilihat dari realisasi dan capaiannya pada tujuan strategis sudah memenuhi target yang telah ditetapkan atau dengan kategori Baik. Sedangkan di indikator kedua, apabila dilihat dari realisasinya maka sudah memenuhi target yaitu 85% dari target yang ditentukan sebesar 83%. Pelayanan Sekretariat DPRD selama ini dianggap sudah cukup memuaskan untuk DPRD dilihat dari hasil respon kuisisioner yang dibagikan. Kedepannya agar lebih ditingkatkan lagi pelayanan terhadap DPRD terutama dalam kesigapan dan kecepatan dalam melayani

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen, sebagaimana dimaksud dalam gambaran pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen, maka isu – isu strategis yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen pada dasarnya terdiri dari potensi, peluang, dan tantangan sebagai suatu kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan atau kegiatan yang akan disusun karena dampaknya akan terlihat bagi sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dimasa yang akan datang. Maka isu-isu strategis yang dapat diidentifikasi dalam rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten yaitu sebagai berikut:

a. Kinerja Pelayanan, Permasalahan dan Hambatan Pelaksanaan Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD pada tahun 2023 dan diproyeksi hingga Tahun 2026 akan mencapai target 100%. Begitu pula dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai kerangka utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Akan tetapi dibalik capaian tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD.

Beberapa permasalahan yang teridentifikasi hingga diterbitkannya Renja 2025 ini adalah:

- 1) Perubahan peraturan perundang-undangan, pedoman ataupun petunjuk teknis, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan sistem pelayanan dan fasilitasi kedewanan tidak berbanding lurus dengan pelaksanaan sosialisasi kepada Anggota DPRD maupun aparatur Sekretariat DPRD.
- 2) Perubahan personil/mutasi baik pejabat struktural maupun staf pejabat fungsional umum yang setiap saat berubah. Sehingga membutuhkan adaptasi lingkungan kerja bagi pegawai baru yang sangat jauh berbeda dengan satuan kerjanya sebelumnya.
- 3) Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar bagian ditambah masih ada aparatur yang belum mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- 4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting, sehingga terjadi kesalahan dan permasalahan berulang pada pelaksanaan program atau kegiatan.

b. Tantangan, Peluang

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya memperhatikan beberapa faktor permasalahan dan penghambat, terdapat beberapa hal yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen antara lain.

1) Tantangan

Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dalam pengembangan pelayanan adalah:

- a) Tuntutan Pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari Pimpinan dan segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD.
- b) Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD.
- c) Perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh pada Kode Etik dan tata tertib DPRD.
- d) Lemahnya peran dan koordinasi internal dan eksternal antar perangkat daerah.
- e) Rendahnya kesempatan aparatur dalam meningkatkan kompetensinya.
- f) Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya perangkat Teknologi.

2) Peluang

Sementara, beberapa peluang Sekretariat DPRD untuk menjawab beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan adalah:

- a) Telah diterbitkannya beberapa regulasi baru terkait pelaksanaan keprotoleran, hak dan keuangan anggota DPRD, pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD, serta pedoman tata tertib DPRD.
- b) Tetap diupayakannya adaptasi atas Perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh pada Kode Etik dan tata tertib DPRD.
- c) Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Jadwal Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) yang disusun oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah, dan tetap diupayakannya penguatan kerjasama dengan Organisasi perangkat daerah atau Instansi terkait dan Anggota Forkopimda untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPRD seperti dialog atau dengar pendapat penerimaan Aspirasi dari masyarakat, melibatkan DPRD dalam kegiatan Musrenbang dan kegiatan-kegiatan lainnya.
- d) Terbukanya kesempatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM dimasa yang akan datang.

- e) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya perangkat Teknologi.

c. Rekomendasi Pelaksanaan Pelayanan.

Dalam rangka penanggulangan masalah dan upaya memanfaatkan peluang yang ada, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut untuk ditindak lanjuti dalam penyusunan program/kegiatan sebagai berikut:

- 1) Memanfaatkan semaksimal mungkin struktur organisasi, jumlah pegawai, sarana dan prasarana kerja serta jumlah anggaran yang ada yang merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen.
- 2) Keterbatasan sumber daya manusia yang profesional, sarana dan prasarana yang belum lengkap dan memadai perlu semakin ditingkatkan guna mendukung perkembangan tugas-tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan.
- 3) Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD merupakan tantangan yang harus direspon dengan baik melalui dukungan kinerja staf Sekretariat DPRD berupa pemikiran dan gerak pelaksanaan yang cepat dan tepat.
- 4) Lingkungan kerja yang harmonis dan hubungan koordinasi yang mantap antar lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah serta dukungan partai politik dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan menumbuhkan semangat kerja untuk melaksanakan tugas yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel berikut, Tabel 2.3 :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD				Program/Kegiatan	Lokasi	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif			Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Kebutuhan Dana		
						(Rp.000)						(Rp.000)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD				66.972.186.525	UNSUR PENDUKUNG URUSAN Pemerintahan	Sekretariat DPRD				66.972.186.525		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat DPRD				66.972.186.525	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat DPRD				66.972.186.525		
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD	Cakupan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Terfasilitasi [%]	100	%	43.842.755.525	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD	Cakupan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Terfasilitasi [%]	100	%	43.842.755.525		
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan [%]	100	%	39.218.880.525	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan [%]	100	%	39.218.880.525		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86	orang/bulan	39.218.880.525	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	86	orang /bula n	39.218.880.525		
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan [%]	100	%	130.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan [%]	100	%	130.000.000		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36	orang	130.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36	orang /bula n	130.000.000		
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah [%]	100	%	1.045.897.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah [%]	100	%	1.045.897.000		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	34.025.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	34.025.000		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	paket	129.400.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	paket	129.400.000		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	662.473.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	662.473.000		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	paket	129.999.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan	3	Paket	129.999.000		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD				Program/Kegiatan	Lokasi	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
			Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif			Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Kebutuhan Dana		
						(Rp.000)						(Rp.000)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	dokumen	15.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	dokumen		15.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	laporan	75.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [laporan]	5	laporan		75.000.000	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretariat DPRD	Cakupan pengadaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah [%]	100	%	46.406.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretariat DPRD	Cakupan pengadaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah [%]	100	%		46.406.000	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	unit	46.406.000	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang dipelihara	5	unit		46.406.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah [%]	100	%	772.126.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah [%]	100	%		772.126.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	laporan	6.996.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2	laporan		6.996.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	396.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan[laporan]	12	laporan		396.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	369.130.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa layanan umum kantor yang disediakan [laporan]	12	laporan		369.130.000	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah [%]	100	%	1.528.004.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah [%]	100	%		1.528.004.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38	unit	604.338.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38	unit		604.338.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	923.666.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit		923.666.000	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD				Program/Kegiatan	Lokasi	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
			Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif			Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Kebutuhan Dana	
						(Rp.000)						(Rp.000)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
7	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Sekretariat DPRD	Persentase terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD [%]	100	%	586.450.000	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Sekretariat DPRD	Persentase terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD [%]	100	%	586.450.000	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4	paket	511.450.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4	paket	511.450.000	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50	orang	75.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah orang yang mengikuti medical check up	50	orang	75.000.000	
8	Layanan Administrasi DPRD	Sekretariat DPRD	Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD [%]	100	%	514.992.000	Layanan Administrasi DPRD	Sekretariat DPRD	Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD [%]	100	%	514.992.000	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	110	laporan	255.000.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah laporan rapat koordinasi yang terlaksana [Laporan]	134	laporan	255.000.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12	paket	259.992.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Jumlah laporan tersedianya logistik rumah tangga DPRD [Laporan]	12	laporan	259.992.000	
B	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD tepat waktu [%]	100	%	23.129.431.000	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD tepat waktu [%]	100	%	23.129.431.000	
9	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Sekretariat DPRD	Prosentase tercapainya pembentukan perda dan peraturan DPRD [%] Jumlah pembahasan rancangan perda dan peraturan DPRD	100	%	173.835.000	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Sekretariat DPRD	Prosentase tercapainya pembentukan perda dan peraturan DPRD [%]	100	%	173.835.000	
	Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4	dokumen	58.835.000	Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4	dokumen	58.835.000	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	1	dokumen	55.000.000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	dokumen	55.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1	dokumen	60.000.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		Jumlah dokumen Penyusunan Naskah Akademik [dokumen]	1	dokumen	60.000.000	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD				Program/Kegiatan	Lokasi	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
			Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif			Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Kebutuhan Dana		
						(Rp.000)						(Rp.000)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	
10	Peningkatan Kapasitas DPRD	Sekretariat DPRD	Persentase tercapainya kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD [%]		%	3.615.478.000	Peningkatan Kapasitas DPRD	Sekretariat DPRD	Persentase tercapainya kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD [%]		%		3.615.478.000	
	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan tugas DPRD	6	laporan	2.500.000.000	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD [laporan]	6	laporan		2.500.000.000	
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD		Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD [dokumen]	4	dokumen	425.478.000	Publikasi dan Dokumentasi DPRD		Jumlah dokumen media penyebaran informasi [dokumen]	4	dokumen		425.478.000	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	17	orang	510.000.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah laporan kelompok pakar dan tim ahli [laporan]	17	orang		510.000.000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6	orang	180.000.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah laporan tenaga ahli fraksi [laporan]	6	laporan		180.000.000	
11	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Sekretariat DPRD	Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat [%]	100	%	4.290.118.000	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Sekretariat DPRD	Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat [%]	100	%		4.290.118.000	
	Pelaksanaan Reses		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses [Dokumen]	3	dokumen	4.290.118.000	Pelaksanaan Reses		Jumlah kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD [Dokumen]	3	dokumen		4.290.118.000	
12	Fasilitasi Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Persentase laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD [%]	100	%	15.050.000.000	Fasilitasi Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Persentase laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD [%]	100	%		15.050.000.000	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD [laporan]	150	dokumen	15.000.000.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah laporan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD [laporan]	150	dokumen		15.000.000.000	
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan,dan Kinerja DPRD yang Disusun	1	laporan	50.000.000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah Dokumen Laporan Kinerja DPRD yang Disusun	1	laporan		50.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan dari Anggota DPRD Kabupaten Sragen. Anggota DPRD mempunyai peran penting dalam pemerintahan dilingkup kabupaten/kota. Anggota dewan menjadi wakil atau perpanjangan tangan dari masyarakat. Waktu kerja DPRD dibagi menjadi tiga persidangan dalam satu tahun. Setiap masa persidangan terdiri dari masa sidang dan masa reses. Masa reses adalah masa kegiatan anggota dewan di luar masa sidang. Pada masa reses anggota dewan akan melakukan kegiatan di luar gedung DPRD. Pada masa ini para dewan memiliki kesempatan untuk berjumpa dengan masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Pada saat masa reses, anggota dewan juga dapat melakukan pengawasan atau monitoring. Kegiatan yang perlu dilakukan oleh para dewan adalah menemui elemen pemerintah, kelompok masyarakat, komunitas perempuan, komunitas pemuda, dan masyarakat umum. Dalam melakukan fungsi pengawasan atau kunjungan kerja, anggota dewan bisa melakukannya secara individu maupun berkelompok. Pemerintah maupun DPRD dapat menyerap aspirasi dari masyarakat melalui kegiatan reses ini. Penyerapan aspirasi dilakukan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan. Kegiatan dilakukan dalam dua tahap, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Setelah selesai menjalani masa reses, anggota DPR/DPRD diwajibkan membuat laporan pelaksanaan kegiatan. Laporan tersebut akan disampaikan pada saat rapat paripurna. Kegiatan reses anggota DPRD terdiri dari empat tahap yaitu Rapat Badan Musyawarah tentang jadwal pelaksanaan dan lokasi reses, Penjelasan pelaksanaan reses oleh pimpinan dan sekretariat DPRD, Masa tugas reses, dan Rapat laporan reses. Masa reses adalah kesempatan bagi DPR/DPRD untuk mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat. Begitupun menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengutarakan pendapatnya.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				
	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Kabupaten Sragen	Jumlah laporan kegiatan Reses	3 laporan	Penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pada pelaksanaan Pemerintahan Tahun 2020-2024, pemerintah telah menggodok Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Untuk lima tahun ke depan RPJMN disusun sesuai dengan lima visi utama Presiden Joko Widodo.

Bappenas menyinkronkan RPJMN dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, terlihat bahwa ada kontinuitas dengan RPJMN sebelumnya, di antaranya masih pentingnya pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur akan difokuskan pada konektivitas dengan kawasan industri menengah dan kecil, kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan pariwisata, dan kawasan produksi rakyat lainnya. Artinya, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk pembangunan wilayah sekitar yang lebih luas.

Di sisi SDM pembangunan secara multidimensional juga akan dilakukan meliputi pendidikan dan kesehatan. Isu stunting, kesehatan ibu mengandung, dan kematian ibu melahirkan menjadi prioritas. Untuk pendidikan juga bukan lagi bicara angka partisipasi kasar, tapi bicara kualitas pendidikan dan menjadikan vokasi sebagai pendidikan mainstream di Indonesia.

Selain itu, penyelenggaraan birokrasi Indonesia akan diperbaiki sesuai esensinya, yaitu mempermudah dan mempercepat pembangunan nasional. Belum efisiennya penyelenggaraan birokrasi berdampak kemudian terhadap penggunaan APBN yang menjadi visi terakhir Presiden. Meski masih terbatas, nilai APBN setiap tahunnya cukup besar dan perlu diarahkan untuk pengeluaran yang tepat sasaran dan berdampak jelas bagi perekonomian.

Pokok-pokok Kebijakan program nasional yang terkait dengan kegiatan Sekretariat DPRD meliputi arah kebijakan daerah. Beberapa Pokok-pokok Kebijakan program nasional yang sesuai dengan tupoksi Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD untuk mencukupi kebutuhan keuangan Anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan Tupoksi Anggota DPRD;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan rapat - rapat DPRD;
4. Meningkatkan kualitas penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Untuk itu Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola Sekretariat Dewan;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
4. Penyediaan anggaran yang mencukupi untuk membiayai kegiatan - kegiatan Anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD;
5. Penyelenggaraan rapat - rapat DPRD, Sosialisasi, penjangkaran aspirasi Anggota DPRD dan penerimaan tamu - tamu DPRD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sementara sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

- 1) Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan disini adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dalam jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2021-2026. Maka rumusan tujuan Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2025 adalah Meningkatkan pelayanan untuk menunjang kinerja DPRD dan Meningkatkan koordinasi antara pihak legislatif dan eksekutif untuk meningkatkan kualitas dan publikasi produk hukum.
- 2) Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dalam jangka waktu 1 (satu) tahun melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun mendatang. Adapun sasaran yang hendak dicapai berdasarkan rumusan tujuan tersebut di atas adalah sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra adalah Meningkatnya kinerja DPRD dan Meningkatnya koordinasi antara pihak legislatif dan eksekutif untuk meningkatkan kualitas dan publikasi produk hukum.

Untuk uraian lebih lengkap mengenai Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sasaran secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan perangkat daerah

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD	Tingkat kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	75%	80%	83%	85%	88%	90%

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan tujuan dan sasaran. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Sekretariat DPRD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan menjadi faktor untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan tentunya faktor penunjang dalam mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat DPRD pada tahun berkenan.

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD pada Tahun 2025 merupakan program dan kegiatan yang terumus dalam Renstra Sekretariat DPRD Perubahan Tahun 2021-2026. Setelah memililah skala prioritas, maka Sekretariat DPRD merencanakan 2 Program kerja yang terdiri dalam 12 kegiatan dan 28 Sub Kegiatan dengan estimasi anggaran yang dibutuhkan sebesar **Rp66.972.186.525,-** sebagai berikut:

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD dengan indikator kinerja;

- a. Kegiatan Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD dengan indikator kinerja Prosentase tercapainya pembentukan perda dan peraturan DPRD
 - Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan.
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan penjelasan/Keterangan dan/atau naskah Akademik dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi
- b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan indikator kinerja Persentase tercapainya kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
 - Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD dengan indikator kinerja jumlah dokumen hasil pelaksanaan tugas DPRD.
 - Sub Kegiatan Publikasi dan dokumentasi Dewan dengan indikator kinerja jumlah dokumen publikasi dan dokumentasi DPRD.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli dengan indikator kinerja jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli.

- Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dengan indikator kinerja jumlah tenaga ahli fraksi.
- c. Kegiatan Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat dengan indikator kinerja Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses dengan indikator kinerja jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses.
- d. Kegiatan Fasilitasi tugas DPRD dengan indikator kinerja Persentase laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dengan indikator kinerja jumlah laporan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD dengan indikator kinerja jumlah laporan fraksi, alat kelengkapan, dan kinerja DPRD.

2. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja;

- a. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah dengan indikator kinerja Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan
 - Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.
- b. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan indikator kinerja Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan indikator kinerja Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti.
- c. Pendidikan dan Pelatihan Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah dengan indikator kinerja Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dengan indikator kinerja Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor dengan indikator kinerja Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.
 - Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor dengan indikator kinerja Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan

- Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan indikator kinerja Jumlah dokumen dicetak dan digandakan.
 - Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan indikator kinerja jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan indikator kinerja jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd.
- d. Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan indikator kinerja Cakupan pengadaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah
- e. Sub Kegiatan Pemeliharaan mebel dengan indikator kinerja Jumlah mebel yang dipelihara.
- f. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator kinerja jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator kinerja jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.
- g. Kegiatan Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan dengan indikator kinerja jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.
 - Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan indikator kinerja Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara.
- h. Kegiatan Layanan keuangan kesejahteraan DPRD dengan indikator kinerja Persentase terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD

- Sub Kegiatan Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD dengan indikator kinerja Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD dengan indikator jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD.
- i. Kegiatan Layanan administrasi DPRD dengan indikator kinerja Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD
 - Sub Kegiatan Fasilitas rapat dan koordinasi dan konsultasi DPRD dengan indikator kinerja Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD.
 - Sub Kegiatan Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD dengan indikator kinerja jumlah paket kebutuhan rumah tangga dprd yang disediakan.

3.4 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- Jadwal badan musyawarah DPRD Kabupaten Sragen
- Pengembangan daerah terisolir,

3.5 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Sekretariat DPRD tahun 2025 memiliki 2 (dua) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan dengan jumlah pagu sebesar 66.972.186.525.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Hingga pelaksanaan penyusunan Renja 2025, terdapat berbagai perbedaan terhadap apa yang telah direncanakan pada Renstra 2021-2026 dan hasil pelaksanaan kinerja tahun 2023 dan proyeksi pelaksanaan hingga akhir periode Renstra 2021-2026. Secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup Sekretariat DPRD yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra 2021-2026 sebagaimana digambarkan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Sragen

No. Urut					Urusan/ Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	2				SEKRETARIAT DPRD										66.972.186.525	71.080.760.067
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Meningkatnya pelaksanaan layanan penunjang urusan pemerintah	Kab. Sragen	Cakupan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Terfasilitasi [%]	100%					43.842.755.525	51.274.254.067
4	2	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Kab. Sragen			Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan [%]	100%			39.218.880.525	47.070.760.067
4	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Sragen					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 orang/bulan	39.218.880.525	47.070.760.067
4	2	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Kab. Sragen			Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan [%]	100%			130.000.000	109.475.000
4	2	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Kab. Sragen					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 orang	130.000.000	109.475.000
4	2	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Kab. Sragen			Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah [%]	100%			1.045.897.000	901.449.000
4	2	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Sragen					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	34.025.000	35.000.000

No. Urut					Urusan/ Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
4	2	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Sragen					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	129.400.000	216.290.000
4	2	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Sragen					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	662.473.000	460.428.000
4	2	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Sragen					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	129.999.000	124.731.000
4	2	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kab. Sragen					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	15.000.000	15.000.000
4	2	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Sragen					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 laporan	75.000.000	50.000.000
4	2	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Kab. Sragen			Cakupan pengadaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah [%]	100%			46.406.000	47.772.000
4	2	1	02.07	5	Pengadaan Mebel			Kab. Sragen					Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	46.406.000	47.772.000
4	2	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kab. Sragen			Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah [%]	100%			772.126.000	718.712.000
4	2	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Sragen					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	6.996.000	6.000.000
4	2	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Sragen					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	396.000.000	353.000.000
4	2	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Sragen					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	369.130.000	359.712.000
4	2	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kab. Sragen			Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah [%]	100%			1.528.004.000	1.253.844.000
4	2	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Sragen					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38 unit	604.338.000	555.218.000

No. Urut					Urusan/ Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
4	2	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Sragen					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	923.666.000	698.626.000
4	2	1	02.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			Kab. Sragen			Persentase terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD [%]	100%			586.450.000	607.250.000
4	2	1	02.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			Kab. Sragen					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 paket	511.450.000	532.250.000
4	2	1	02.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			Kab. Sragen					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 orang	75.000.000	75.000.000
4	2	1	02.16		Layanan Administrasi DPRD			Kab. Sragen			Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD [%]	100%			514.992.000	564.992.000
4	2	1	02.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			Kab. Sragen					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	110 laporan	255.000.000	305.000.000
4	2	1	02.16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			Kab. Sragen					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 paket	259.992.000	259.992.000
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Meningkatnya Dukungan Terhadap Kinerja DPRD	Kab. Sragen	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD tepat waktu [%]	100%					23.129.431.000	19.806.506.000
4	2	2	02.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			Kab. Sragen			Prosentase tercapainya pembentukan perda dan peraturan DPRD [%]	100%			173.835.000	335.000.000
4	2	2	02.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			Kab. Sragen					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4 dokumen	58.835.000	220.000.000
4	2	2	02.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			Kab. Sragen					Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 dokumen	55.000.000	55.000.000
4	2	2	02.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik			Kab. Sragen					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 dokumen	60.000.000	60.000.000

No. Urut					Urusan/ Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
4	2	2	02.04		Peningkatan Kapasitas DPRD			Kab. Sragen			Persentase tercapainya kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD [%]	100%			3.615.478.000	2.955.964.000
4	2	2	02.04	2	Pendalaman Tugas DPRD			Kab. Sragen					Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 laporan	2.500.000.000	1.400.000.000
4	2	2	02.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan			Kab. Sragen					Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4 laporan	425.478.000	425.964.000
4	2	2	02.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			Kab. Sragen					Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	17 orang	510.000.000	480.000.000
4	2	2	02.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			Kab. Sragen					Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 orang	180.000.000	180.000.000
4	2	2	02.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			Kab. Sragen			Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat [%]	100%			4.290.118.000	2.965.542.000
4	2	2	02.05	3	Pelaksanaan Reses			Kab. Sragen					Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	4.290.118.000	2.965.542.000
4	2	2	02.08		Fasilitasi Tugas DPRD			Kab. Sragen			Persentase laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD [%]	100%			15.050.000.000	13.550.000.000
4	2	2	02.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			Kab. Sragen					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	150 dokumen	15.000.000.000	13.500.000.000
4	2	2	02.08	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD			Kab. Sragen					Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	50.000.000	50.000.000

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD ini selain menjadi panduan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen. Mengacu pada usulan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen

Tahun 2025 terdapat 2 program dan 12 kegiatan serta 28 Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp66.972.186.525,- (Enam Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah). Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Rencana kerja (Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Sekretariat DPRD. Untuk memperoleh pencapaian hasil yang optimal pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat DPRD, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar terlaksana keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum SKPD di bawah lingkup Badan Perencanaan Pembangunan daerah, agar program/ kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program dan sektor.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

1. Rencana kerja (Renja) Sekretariat DPRD tahun 2025 dalam rangka mensinkronisasikan dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya yaitu (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi,, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten dan Renstra SKPD).

2. Di dalam penyusunan Rencana kerja (Renja) Sekretariat DPRD tahun 2025 masih belum sempurna, terkait dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dimana pemahaman tentang aturan tata cara penyusunan masih berbeda-beda.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud
3. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

Demikian Rencana kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini disusun, kiranya benar-benar menjadi acuan dalam menjalankan program dan kegiatan Sekretariat DPRD di Tahun anggaran 2025.

Sragen, 17 Juli 2024

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN



Drs. TEDI ROSANTO, M.Si
NIP. 19680624 198803 1 002